

***E-PLANNING* DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

Erik Kalalembang^{1*}, Alwi², Arianto³

¹Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

²Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

³Departemen Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

*Email : erik_kalalembang@yahoo.com

ABSTRAK

Kehadiran *new media* dalam bentuk aplikasi *e-planning* memudahkan aktivitas sistem perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Penggunaan *E-planning* dalam sistem perencanaan memudahkan dalam menentukan program prioritas, menata berbagai aspek data perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan komprehensif, baik dalam struktur, jenis maupun format data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Selanjutnya, data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dari informan yang ditetapkan berdasarkan *purposive sampling* sejumlah 15 (lima belas) informan. kemudian data yang terkumpul di analisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem perencanaan berbasis aplikasi *new media e-planning* pemerintah daerah propinsi Sulawesi Barat memberi kemudahan dalam proses penyusunan sistem perencanaan pemerintahan. Keberadaan *E-planning* dalam sistem perencanaan pemerintahan memberikan kemudahan dalam hal, meliputi : (1) penggunaan dan fleksibilitas, bersesuaian kebutuhan organisasi pemerintah, (2) informasi, lebih mudah dibagi dan dipertukarkan antara banyak pengguna secara bersamaan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (3) penyimpanan database, efektif dan efisien dalam proses penyusunan perencanaan, (4) sinkronisasi data, sinkronisasi informasi dokumen perencanaan, dan (5) keterlibatan masyarakat ataupun organisasi untuk mengakses informasi.

Kata kunci : E-planning; New Media; Perencanaan Pembangunan Daerah

Submisi : 11 Juli 2019

Pendahuluan

Dalam kehidupan kita sehari-hari komunikasi sangat penting, dan kita sebagai manusia tidak bisa menghindari dari berkomunikasi, yaitu mengirimkan dan menerima informasi. Melalui komunikasi tersebut seseorang dapat menyampaikan pikiran atau ide kepada orang lain dan membuat dirinya merasa tidak asing

terhadap lingkungan sekitarnya. Komunikasi mempunyai definisi yang luas dan beragam. Masing-masing definisi mempunyai penekanan arti dan konteks yang berbeda satu sama lainnya. Demikian juga komunikasi yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan, menurut Rogers, bahwa komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu

penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Cangara, 2016:22). Demikian juga pendapat dari Theodorson (1969), bahwa komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide, sikap-sikap, atau emosi dari seseorang atau kelompok kepada yang lain atau yang lain-lainnya, terutama melalui simbol-simbol (Harun, 2012:22). Hal ini mendasari bahwa sangat pentingnya komunikasi dalam suatu proses perencanaan pembangunan untuk melibatkan setiap komponen masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan ide-ide dan penyebaran informasi dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang sangat penting dalam mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dengan beragam permasalahan dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan perencanaan pembangunan yang efektif dapat mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah yang berdampak pada efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan yang ada, maka pemerintah daerah harus menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, kemandirian, berwawasan lingkungan, serta berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, ketika perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, serta tanggap terhadap perubahan akan mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Seperti yang diungkapkan Arthur W. Lewis dalam Sjafrisal (2015:24) bahwa perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yaitu berkembangnya teknologi internet yang menawarkan segala fasilitas dan kemudahan, yang pada akhirnya akan mendorong perubahan ekonomi dan sosial yang mengubah aktivitas bisnis dan masyarakat. Dengan kata lain bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah bagaimana orang belajar, bekerja, bepergian, bermain dan memerintah. Karena teknologi informasi tersebut, memungkinkan kita untuk menelusuri, menyimpan, memproses dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk dan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Perubahan akan pemanfaatan TIK ini menjadi nilai tambah yang baru bagi kecerdasan manusia dan membentuk suatu perubahan bagaimana kita saling bekerja sama dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat dalam pembangunan.

Seiring dengan perkembangan TIK juga bermanfaat dalam pencapaian efektifitas dan efisiensi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara pemerintahan serta menjadi sarana tersendiri bagi pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan yang pada akhirnya akan memicu transformasi paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana penyelenggaraan pemerintahan terjadi pembaharuan administrasi yang menunjukkan suatu peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berbagai upaya dalam perbaikan dan peningkatan teknik, proses dan sistem layanan pemerintahan.

Sarana komunikasi pemerintah yang dulunya hanya terbatas pada media cetak dan televisi telah berkembang dengan pesat melalui teknologi internet sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan memanfaatkan teknologi internet tersebut merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* yang telah melakukan *Eletronic Government (E-Government)* yang merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan demikian peranan komunikasi dengan media internet dalam pembangunan sangat penting, karena tidak hanya menyeimbangkan antara program kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat, tetapi juga membangun hubungan interaksi antar pemerintah serta interkasi pemerintah dan masyarakat, adanya perluasan pasar, dukungan kebijakan nasional serta menarik minat investasi dalam sektor publik yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tersebut, pemerintah sering menghadapi kendala dalam menyusun kebijakan ataupun program dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kendala penataan dan pengelolaan pemerintahan yang memiliki cakupan aspek yang luas dan kompleks, sehingga dalam proses pembangunan membutuhkan banyak informasi mengenai aspek strategis dalam menetapkan program prioritas sebagai langkah awal perbaikan kinerja pemerintahan. Untuk itu, dalam penataan dan pengelolaan pemerintahan yang baik sangat diperlukan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan dengan menerapkan sistem perencanaan secara elektronik (*e-planning*) yang berbasis *online*.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan *e-planning* sebagai inovasi dari media komunikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah berbasis elektronik. Aplikasi *e-planning* disosialisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2015 dan pertama kali digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis peran dari aplikasi *e-planning* dalam konsep *new media* yang telah diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana konsep *new media* yang merupakan pemahaman dari perkembangan zaman terkait teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas, sehingga mampu merubah pencapaian kinerja pemerintah yang lebih baik. Dengan demikian, yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana penggunaan *e-planning* sebagai *new media* dalam sistem perencanaan pembangunan daerah ?

New Media

Istilah ‘media baru’ atau ‘*new media*’ telah digunakan sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan yang semakin berkembang dan beragam. Yang menjadi ciri utama dari *new media* adalah kesalingterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaannya yang beragam sebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada ‘dimana-mana’ (*delocatedness*). Dua kekuatan utama perubahan awalnya yaitu komunikasi satelit dan pemanfaatan komputer. Kunci untuk kekuatan komputer

yang besar sebagai sebuah mesin komunikasi terletak pada proses digitalisasi yang memungkinkan segala bentuk informasi dibawa dengan efisien dan saling berbaur. Pada prinsipnya, tidak lagi ada kebutuhan untuk berbagai media berbeda yang telah disebutkan sebelumnya, karena semuanya dapat dimasukkan ke dalam jaringan komunikasi komputer dan pusat penerimaan yang sama (McQuail, 2011:42).

Bentuk-bentuk media massa yang lama digantikan oleh media yang lebih baru dan biasanya lebih efisien. Tetapi bagaimanapun bentuk media baru yang muncul, sesungguhnya tidaklah menggeser sampai hilang sama sekali media lama. Secara intrinsik perkembangan media atas dasar teknologi membawa implikasi pada format dan karakteristik orientasi media. Dengan kata lain, “desakan” media yang muncul belakangan menyebabkan media sebelumnya harus melakukan penyesuaian (Aprilani, 2011).

Kesan awal yang muncul dari konsep media baru sering diartikan secara sederhana sebagai media interaktif yang menggunakan perangkat dasar komputer. Pengertian media baru selanjutnya memberikan cakupan yang lebih luas seperti yang diungkapkan oleh Croteau (1997) bahwa media baru yang muncul akibat inovasi teknologi dalam bidang media meliputi televisi kabel, satelit, teknologi fiber optik dan komputer (Kurnia, 2005). Hal ini juga diperjelas dalam McQuail (2011:148) bahwa media baru adalah berbagai perangkat teknologi informasi yang berbagi ciri yang sama yang mana selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi.

Menurut Marshall McLuhan, kehadiran *New Media* dapat membuat sebuah proses komunikasi menjadi *Global Village*. McLuhan mengatakan bahwa dunia akan menjadi satu desa global (*Global Village*) dimana produk-produk yang ada akan menjadi citarasa semua orang. *Global Village* menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat dengan menggunakan teknologi internet. Lebih lanjut McLuhan mengemukakan bahwa teknologi bukan sesuatu yang berada di luar diri kita. Teknologi adalah perpanjangan diri kita, perpanjangan diri dalam berkomunikasi dengan orang lain (Nuswantoro, 2014).

New Media adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode yang kompleks dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Teori digital selalu berhubungan dengan media karena media merupakan sesuatu yang terus berkembang. Mungkin banyak diantara kita masih belum paham yang namanya *New Media*. *New Media* adalah media yang terbentuk dari interaksi manusia dengan teknologi. Teknologi sering kali digambarkan sebagai pengaruh yang paling penting terhadap masyarakat, McLuhan merasa bahwa masyarakat sangat bergantung pada teknologi yang menggunakan media dan bahwa ketertiban sosial suatu masyarakat didasarkan pada kemampuannya untuk menghadapi teknologi tersebut (West dan Turner, 2014:139).

Beberapa media yang umum dianggap sebagai *new media* adalah Internet dengan begitu banyak aplikasinya seperti email, situs, blog, situs jejaring sosial, situs berbagi video, game *online*, e-books, koran *online* dan lain sebagainya. Di luar Internet dapat dimasukkan antara lain; DVD, komputer multi media, handphone, SMS. Hal ini, menunjukkan bahwa internet dalam konteks media baru memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang, seperti : untuk mengakses informasi akan lebih cepat dan murah, menghemat biaya produksi dan distribusi, menciptakan komunikasi yang interaktif, serta dapat menjadi alat untuk research dan development. Begitu banyak hal yang dapat dilakukan melalui media baru ini, yang dimungkinkan karena media baru memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan Feldman (Mudjiyanto, 2012) sebagai berikut :

- a. Manipulable, yaitu mudah diubah dan beradaptasi dalam setiap tahap pembuatan, penyimpanan, pengiriman dan penggunaan.
- b. Networkable, yaitu mudah dibagi dan dipertukarkan antara banyak pengguna secara bersamaan dan melewati jarak yang jauh sekaligus.
- c. Dense, yaitu jumlah informasi digital yang besar dapat disimpan dalam ruang fisik kecil.
- d. Compressible, yaitu kapasitas informasi dapat diringkas sesuai kebutuhan.
- e. Impartial, yaitu informasi digital mudah disebarkan jaringan tanpa peduli dalam bentuk apa informasi tersebut diwakilkan, siapa yang memiliki atau membuat informasi tersebut, atau untuk apa informasi tersebut akan digunakan.

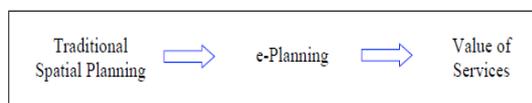
Dengan melalui media baru masyarakat dapat memperoleh informasi dari seluruh dunia melalui berbagai situs yang terhubung dalam web. Selain itu masyarakat bisa saling berbagi informasi serta saling berkomunikasi melalui berbagai fasilitas yang terdapat di blog, email, instant messaging, serta situs jejaring sosial. Demikian juga new media menjadi saluran komunikasi bagi lembaga pemerintahan maupun pemerintah dengan masyarakat.

E-Planning

Penggunaan sistem *e-planning* sudah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 14 ayat (3) berbunyi “Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*” Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

Environment Agency dalam Sutanta (2010) mengemukakan bahwa *e-planning* merupakan bagian dari inisiatif e-government yang mengacu pada proses penyampaian layanan perencanaan secara elektronik menggunakan internet. Itu bertujuan untuk meningkatkan proses perencanaan tata ruang tradisional dan

pengiriman ke masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal tersebut menjadi tujuan akhir untuk mencapai kualitas layanan yang lebih baik, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Sejumlah layanan dapat dikirimkan secara *online*, seperti aplikasi izin perencanaan, konsultasi, perencanaan dokumen dan peraturan, dan penyediaan peta interaktif untuk memvisualisasikan zona perencanaan. Implementasi *e-planning* membutuhkan visi tingkat tinggi, kebijakan pendukung, persiapan yang cermat, sesuai kebutuhan yang memadai keahlian teknis dan dukungan pendanaan.



Gambar 1. *E-planning* untuk meningkatkan kualitas layanan. Sumber : Sutanta (2010)

Menurut Hakim dalam Nugroho (2017) bahwa Aplikasi *e-planning* merupakan wadah dari berbagai aplikasi lain yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan di daerah. Dengan aplikasi *e-planning* diharapkan mampu menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) yang berkualitas karena digunakan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan selama lima tahun ke depan agar tujuan dan sasaran perangkat daerah akan sesuai dengan yang direncanakan. Hal tersebut juga diungkapkan Mirza (2014) bahwa perlu membangun sistem komputerisasi yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dimulai dari perangkat pedesaan sampai ke pusat, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan kondisi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat menentukan program

prioritas terhadap perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Dengan demikian, sistem *e-planning* diharapkan dapat menata berbagai aspek data perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan komprehensif, baik dalam struktur, jenis maupun format data untuk perencanaan pembangunan.

Beberapa manfaat diterapkannya aplikasi perencanaan *e-planning* diantaranya (<https://www.integraindonesia.co.id>) :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat dilakukan secara *online*;
- b. Database terintegrasi, data perencanaan digunakan untuk data sistem yang lain (sistem anggaran, sistem evaluasi & monitoring, dll);
- c. Pengaturan waktu pertahapan, sehingga penyusunan RKPD dapat berjalan tepat waktu;
- d. Pengawasan serapan anggaran menjadi lebih mudah;
- e. Mendukung single sign on (satu login untuk ke beberapa sistem);

Proses perencanaan menjadi praktis dan mudah.

Metode Penelitian

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Secara metodologis penelitian kualitatif cocok dengan penelitian terhadap kasus ini yang merupakan realitas lapangan untuk dijadikan pelajaran dan akan memberikan manfaat terhadap kebijakan dan fenomena sosial. Dalam penelitian ini peneliti sebagai instrument utama dalam mengungkap data dan fakta-fakta lapangan. Seperti yang

dijelaskan Sugiyono (2018:223) bahwa dalam penelitian instrument utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Jalan Pattana Endeng, Mamuju 91511. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan informan penelitian secara sengaja dengan maksud peneliti memilih informan yang memiliki pengalaman dan mampu memberikan informasi secara komprehensif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan penelitian terdiri dari 15 (lima belas) orang yang memahami dan sebagai pengguna aplikasi *e-planning*.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2018:246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan menganalisa pengaruh dari penggunaan sistem *e-planning* sebagai media komunikasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dari kondisi sebelum dan setelah penggunaan sistem *e-planning* tersebut, kemudian menganalisa pengembangan dari aplikasi *e-planning* yang sesuai dengan kebutuhan instansi dalam proses perencanaan secara elektronik.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, maka akan dibahas secara deskriptif mengenai bagaimana karakteristik *e-planning* sebagai *new media* yang digunakan oleh pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah diperoleh, penulis menggambarkan kelima karakteristik *e-planning* sebagai *new media* sebagai berikut :

1. Penggunaan dan fleksibilitas

Sistem *e-planning* mulai diterapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015 dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 hingga Tahun 2019 dalam

bentuk aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang kemudian peralihan sistem *e-planning* dalam bentuk aplikasi Sistem Manajemen Daerah Perencanaan (Simda Perencanaan) yang diterapkan dalam proses penyusunan

dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020. Penggunaan aplikasi *e-planning* pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ditunjukkan pada tabel 1 :

Tabel 1. Penggunaan aplikasi *e-planning* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama Aplikasi	Awal Penggunaan (Tahun)	Untuk Penyusunan RKPDP (Tahun)
1	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	2015	2016 - 2019
2	Sistem Manajemen Daerah Perencanaan (Simda Perencanaan)	2019	2020

Sumber : Hasil Reduksi Data Primer, 2019

Pengembangan aplikasi *e-planning* ini merupakan wujud dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pada pemanfaatan aplikasi SIPPD sering timbul permasalahan terkait tidak sinkronnya data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dapat mengakibatkan adanya kegiatan yang direncanakan tetapi tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian Bappeda selaku penanggungjawab dari pemanfaatan sistem *e-planning* mulai menginisiasi untuk peralihan sistem *e-planning* kedalam bentuk aplikasi Simda Perencanaan yang dapat mengintegrasikan antara *e-planning* (untuk penyusunan RKPD) dan *e-budgeting* (untuk penyusunan RKA). Hal tersebut terkait yang dikemukakan oleh salah satu informan Bapak Mulyadi selaku Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Pertanian

Provinsi Sulawesi Barat dalam wawancara, bahwa :

“Memang selama ini perencanaan dengan penganggaran itu masih sifatnya manual, jadi kalau sebelumnya kita menyusun perencanaan melalui aplikasi e-planning dan penganggarnya melalui simda keuangan (e-budgeting) untuk penyusunan RKA, nah tahun ini di bappeda mengintegrasikan e-planning dengan e-planning yang namanya simda perencanaan. Jadi sistem perencanaan dan penganggaran ini sudah terintegrasi, apa yang disusun di dalam perencanaan itu juga nanti yang akan lahir didalam penganggaran. Selama ini kan sering ada keluhan bahwa tidak konek antara yang direncanakan dengan yang dianggarkan, tidak sepenuhnya konek antara RKPD dan RKA. Nah tahun ini sudah dimulai

pengintegrasian melalui aplikasi Simda Perencanaan itu, jadi apa yang ditulis di RKPD nanti akan lahir didalam RKA” (wawancara tanggal 23 April 2019).

Dengan sistem *e-planning* yang berbentuk aplikasi *web* memungkinkan untuk dapat dikembangkan mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Secara ideal dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk penggunaan aplikasi yang dapat dilakukan pengembangan berdasarkan *roadmap* sistem perencanaan yang terintegrasi dari awal hingga akhir, yang mana integrasi yang dimaksud mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan sampai kepada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan penggunaan sistem aplikasi secara keseluruhan yang terintegrasi akan memudahkan dilakukan evaluasi yang menjadi bahan perencanaan pada tahun berikutnya dan mengurangi terjadinya bias atau kesalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Angga Tirta Wijaya selaku *administrator* aplikasi *e-planning* kepada peneliti bahwa :

“Gambaran pengembangan secara roadmapnya itu, kita ingin sistemnya itu terintegrasi mulai dari awal sampai akhir yang kita maksud adalah mulai dari kapan itu, kan ada perencanaan, terus proses penganggaran, terus pelaksanaannya, terus pengendalian dan evaluasi. Setelah dari evaluasi ini akhirnya ada lagi muncul yang namanya untuk pelaporan, terakhir masuk ke penyusunan LAKIP. Jadi hasil dari evaluasi itu akan kembali lagi menjadi

bahan perencanaan tahun berikutnya” (wawancara tanggal 27 Maret 2019).

2. Informasi

Aplikasi *e-planning* yang berbasis *internet* memudahkan dalam proses penginputan dokumen perencanaan, sehingga informasi terkait perencanaan dapat diakses tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan demikian penyusunan dokumen perencanaan dapat dilakukan lebih efisien waktu maupun anggaran karena setiap OPD tidak lagi secara terus-menerus melakukan koordinasi tatap muka dengan Bappeda ataupun stakeholder lainnya. Hal tersebut terkait yang dikemukakan oleh salah satu informan Bapak Alamsyah Hasim selaku operator *e-planning* pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat, bahwa :

“Bagusnya e-planning itu, tidak mesti kita menginput di kantor. Di warkop pun bisa karena dia jaringan internet. Kalau e-planning dimana pun bisa mengaksesnya, bahkan kadang saya lagi di Polewali ditelepon ada kegiatan baru mau di input, saya bisa input diluar” (wawancara 20 Maret 2019).

Tujuan dari penggunaan *e-planning* yang berbasis aplikasi *online*, agar dalam proses penyusunan perencanaan dapat saling mengontrol dan memonitor secara langsung sehingga dapat mempercepat proses penyusunan perencanaan. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Abdul Syukur selaku kepala sub bagian program dan pelaporan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat dalam wawancara tanggal 6 Mei 2019, bahwa :

“Tujuannya otomatis memudahkan dalam penyusunan rencana kerja,

karena penyusunan rencana kerja itu sudah berbasis aplikasi jadi sudah tidak berbasis manual lagi, itu intinya. Memudahkan dalam proses perencanaan, jadi dimana saja kita bisa menginput masuk, operator bisa langsung menginput melalui aplikasi dan pada saat bappeda ingin melihat secara keseluruhan renja nya OPD, dapat langsung dilihat tanpa meminta lagi ke OPD karena sudah tersedia didalam aplikasi e-planning”.

Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pihak Bappeda, OPD dan stakeholder lainnya akan dimudahkan dengan hadirnya sistem *e-planning* yang bersifat *online*, karena mulai dari proses penginputan data terkait perencanaan dapat dilakukan kapan dan dimana saja sepanjang terhubung oleh jaringan *internet*.

3. Penyimpanan Database

Dengan penggunaan aplikasi *e-planning*, data-data terkait perencanaan tersimpan dan tersusun rapih dalam sistem database. Kondisi ini merupakan perubahan dari sistem manual yang masih menggunakan dokumen tertulis seperti kertas yang dalam penyimpanannya dapat mengambil ruang yang cukup besar dan memungkinkan dokumen-dokumen tersebut tidak tersusun rapih sehingga sulit untuk mencari ketika dibutuhkan lagi. Sedangkan dengan sistem elektronik sebagaimana *e-planning* diterapkan, dapat memudahkan proses perencanaan pembangunan daerah bagi setiap OPD untuk menyampaikan perencanaannya ke dalam satu database yang menghasilkan satu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan inputan masing-masing OPD

dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Hal ini terkait dengan yang diungkapkan oleh Bapak Agus selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi Sulawesi Barat bahwa :

“E-planning ini memudahkan kita untuk proses perencanaan, kalau dulu masih serba manual yang aksesnya masih sulit. sekarang kita sudah masuk ke e-planning yang memudahkan kita antar OPD untuk melakukan, menyampaikan perencanaan dalam satu database. Jadi nantinya akan menjadi satu dokumen, yang keluarannya nanti berupa RKPD berdasarkan Renja yang diinput oleh OPD” (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2019).

4. Sinkronisasi Data

Integrasi antara aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* akan memudahkan dalam penyusunan RKA sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, yaitu dalam penggunaan aplikasi Simda Perencanaan (*e-planning*) dalam penyusunan RKA sudah berdasarkan data Renja yang disusun sebelumnya dalam aplikasi sehingga tidak lagi melakukan penginputan data pada aplikasi penganggaran, hal ini dapat menjamin sinkronisasi antara dokumen Renja dan dokumen RKA. Hal ini terkait yang dikemukakan Bapak Mulyadi, bahwa :

“Simda Perencanaan ini juga memudahkan kami dalam penyusunan RKA, jadi tidak menginput lagi, jadi pada saat penyusunan RKA kita tidak menginput lagi RKA, karena tinggal menarik apa yang disusun dalam Renja pada aplikasi. sehingga tidak ada lagi bahwa RKA ini tidak sama dengan Renja, karena sudah terintegrasi. Artinya bahwa kita juga dari penyusunan

perencanaan tidak ragu lagi dalam sinkronisasi dokumen antara renja dengan RKA, karena sudah otomatis sinkron seperti itu” (wawancara 23 April 2019).

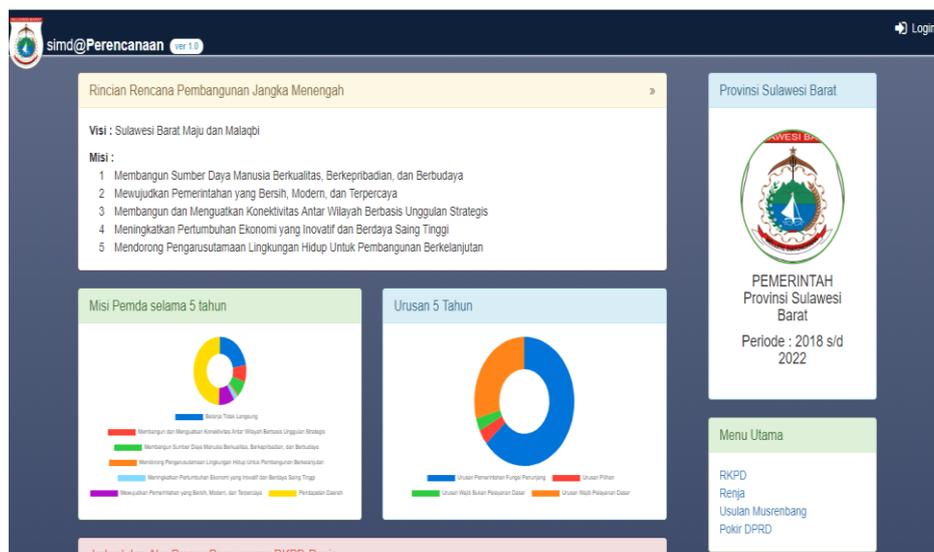
Dengan aplikasi *e-planning* dapat meringkas informasi terkait program dan kegiatan dalam proses perencanaan sesuai dengan kebutuhan, yang sebelumnya harus dilakukan secara berulang-ulang yang memakan waktu cukup lama dapat diringkas dalam kapasitas informasi untuk berbagai kebutuhan organisasi. Seperti informasi terkait dengan Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan dapat dipergunakan untuk penyusunan dokumen yang berbeda, baik itu dokumen perencanaan maupun dokumen penganggaran.

5. Keterlibatan Masyarakat ataupun Organisasi

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah melibatkan banyak pihak, baik itu ASN lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, masyarakat dalam keterkaitannya pada proses pengusulan

melalui musrenbang dan pokok pikiran DPRD, ataupun stakeholder yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam upaya mempermudah koordinasi dalam proses perencanaan bagi setiap pihak, maka diterapkannya *e-planning* dalam bentuk sistem perencanaan elektronik yang bersifat *online*, agar informasi terkait perencanaan pembangunan daerah dapat lebih mudah disebarkan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audience dalam jumlah besar, yang dapat menembus batasan ruang dan waktu.

Aplikasi *e-planning* yang dapat diakses secara *online* membuka ruang bagi setiap individu atau organisasi untuk mengakses informasi yang disediakan melalui halaman website/portal *e-planning*. Misalnya informasi visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat perencanaan selama lima tahunan, dan beberapa informasi lainnya.



Gambar 2. Tampilan Halaman Depan Aplikasi Simda Perencanaan

Dari gambar 2 menunjukkan aplikasi *e-planning* yang menyediakan informasi visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan selama lima tahun kedepan. Hal tersebut juga menjadi informasi penting bagi masyarakat dan *stakeholder* lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Kesimpulan

Sistem *e-planning* memudahkan dan membantu pencapaian kinerja pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena didukung oleh penggunaan *e-planning* dalam kerangka *new media* yang memiliki karakteristik : (1) penggunaan dan fleksibilitas, yaitu *e-planning* yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi sehingga mudah untuk diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemerintah, (2) informasi, yaitu aplikasi *e-planning* yang berbasis *internet* atau *online* sehingga informasi dapat lebih mudah dibagi dan dipertukarkan antara banyak pengguna secara bersamaan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, (3) penyimpanan database, yaitu aplikasi *e-planning* memiliki *database* untuk penyimpanan data-data terkait perencanaan pembangunan daerah sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam proses penyusunan perencanaan, (4) sinkronisasi data, yaitu informasi pada aplikasi *e-planning* dapat disinkronkan, misalnya informasi pada dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra dan Renja bahkan informasi terkait penganggaran, sehingga lebih efisien dalam proses perencanaan, dan (5) keterlibatan masyarakat ataupun organisasi, yaitu aplikasi *e-planning* yang sifatnya *online* memberikan peluang bagi setiap individu

ataupun organisasi untuk mengakses informasi yang tersedia pada aplikasi, sehingga memicu untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- Aprilani. 2011. Radio Internet Dalam Perspektif Determinisme Teknologi. *Jurnal Komunikasi*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2011.
- Baran, Stanley J dan Dennis K. Davis. 2010. *Teori Komunikasi Massa*. Edisi 5. Terjemahan oleh Afrianto Daud, S.Pd.,M.Ed., dan Putri Iva Izzati, S.Sos. Jakarta : Salemba Humanika.
- Cangara, Hafied. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Edisi 2. Cetakan ke-17). Jakarta: Rajawali Pers.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2012. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang dan Teori Kritis*. (Cetakan ke-2). Jakarta : Rajawali Pers.
- Kurnia, Novi. 2005. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru : Implikasi Terhadap Teori Komunikasi. *Jurnal Mediator*, Vol. 6 No. 2 Desember 2005.
- McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Edisi 6 Buku 2. Terjemahan oleh Putri Iva Izzati. Jakarta : Salemba Humanika.
- Mirza, Ahmad Haidar. 2014. Model *E-planning* Untuk Pemerataan Pembangunan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Provinsi Sumatera Selatan. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2014 STMIK AMIKOM Yogyakarta*, 8 Februari 2014.

- Mudjiyanto, Bambang. 2012. Literasi Internet Dan Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Dalam Aktifitas Pemanfaatan Media Baru (Survey Masyarakat Pemilih Pilkada, Kasus Masyarakat Kota Bengkulu). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* Vol. 16 No. 1 (Januari – Juni 2012).
- Nugroho, Wahyu, Achmad Djunaedi, Bakti Setiawan. 2017. *E-planning Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya [Tesis]*. Yogyakarta (ID) : Universitas Gadjah Mada.
- Nuswantoro, Aloysius Ranggabumi. 2014. Konservasi Media: Memori Kultural pada Media-Media Lama. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2014: 111-120.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Cetakan ke-27). Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sutanta, Heri, Abbas Rajabifard, dan Ian Bishop. 2010. Impediments in *e-planning* in Local Government - Indonesian Case Study. *FIG Congress 2010 Facing the Challenges-Building the Capacity Sydney*, Australia, 11-16 April 2010.
- West, Richard dan Lynn H, Turner. 2014. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Edisi 3 Buku 2. Terjemahan oleh Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta : Salemba Humanika.
- <https://www.integraindonesia.co.id/e-planning/#manfaat>, diakses pada tanggal 18 Juni 2019.